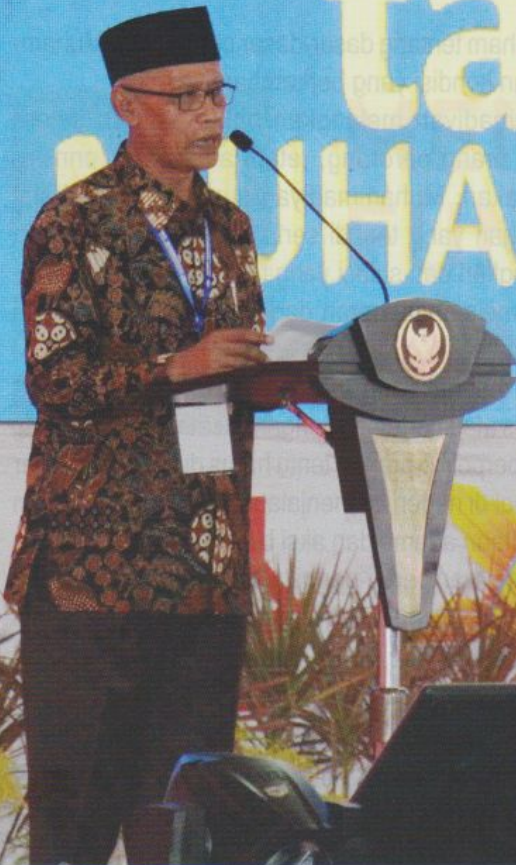


# Tanwir MUHAMMADIYAH



Sumber Foto: Dwi Agus M

## SAMBUTAN IFTITAH TANWIR MUHAMMADIYAH

# “Kedaulatan dan Keadilan Sosial Menuju Indonesia Berkemajuan”

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Yth. Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir H Joko Widodo, beserta Ibu Negara Hj Iriana Joko Widodo;

Yth. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Dr (HC) Zulkifli Hasan, SE, MM), Ketua DPR RI; Ketua DPD RI, dan Ketua-Ketua Lembaga Negara lainnya;

Yth. Para Menteri Kabinet Kerja Republik Indonesia, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia;

Yth. Para Ketua Partai Politik, Para Duta Besar Negara Sahabat, dan Para Tokoh Bangsa dari Pusat hingga Daerah;

Yth. Gubernur Provinsi Maluku (Ir H Said Assegaff),

Wakil Gubernur Maluku (Dr Zeth Sahuburua, SH, MH), Para Gubernur/Wakil Gubernur se-Indonesia Timur; Pangdam Maluku, Kapolda Mauluku, serta Para Kepala Daerah dan Tokoh Adat se-Maluku;

Yth. Para Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Pusat Aisiyyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan Asiyiyah Maluku, dan keluarga besar Muhammadiyah se-Maluku;

Yth. Para Anggota dan Peserta Tanwir Muhammadiyah;

Yth. Para Undangan, Rekan-rekan Media, dan Hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama, kami sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir H Joko Widodo dan Ibu Negara serta para Menteri Kabinet Kerja atas kehadirannya pada Pembukaan Tanwir Muhammadiyah di Kota Ambon ini. Kami mohon kepada Bapak Presiden untuk memberikan amanat pada Pembukaan Tanwir ini, sekaligus Peresmian "Pelayaran dan Pelayanan Perdana Klinik Apung Said Tuhuleley untuk pelayanan Akses Kesehatan."

Kehadiran Bapak Presiden bersama Ibu Negara, Ketua MPR RI, para Menteri Kabinet Kerja, Ketua-Ketua Parpol, para tokoh nasional, dan segenap tamu undangan pada Tanwir ini merupakan suatu kehormatan sekaligus wujud dukungan positif bagi Muhammadiyah dalam usaha-usaha dakwah pencerahan menuju Indonesia berkemajuan.

Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, para Kepala Daerah, dan seluruh jajaran pemerintahan serta masyarakat Maluku yang telah menjadi tuan rumah yang sangat baik dan ramah, sehingga pelaksanaan Tanwir ini lancar dan sukses. Tanwir yang disangga bersama ini menjadi cermin warga Maluku yang hangat, bersahabat, toleran, berjiwa maju, dan memiliki rasa kebersamaan yang tinggi.

Disaksikan Bapak Presiden dan seluruh tamu undangan, kami juga berterimakasih atas dukungan penuh Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur atas pencaangan pendirian Universitas Muhammadiyah Maluku dan RS PKU Muhammadiyah Maluku.

### ***Bapak Presiden dan seluruh hadirin yang kami muliakan.***

Tanwir Ambon 24-26 Februari 2017 ini merupakan permusyawaratan tertinggi di bawah Muktamar, yang diikuti oleh seluruh anggota Pimpinan Pusat dan Organisasi Otonom, perwakilan Wilayah dan Daerah, serta para peninjau dari berbagai perutusan. Tanwir mengambil tema "Kedaulatan dan Keadilan Sosial untuk Indonesia Berkemajuan."

Masalah kedaulatan dan keadilan sosial merupakan agenda sangat penting bagi bangsa Indonesia. Para pendiri bangsa telah meletakkannya sebagai bagian fundamental lahirnya Negara Indonesia. Republik ini tegak jika ada kedaulatan dan keadilan sosial. Sebaliknya, ia kehilangan eksistensinya jika tiada kedaulatan dan keadilan sosial. Bung Karno menggelorakan Trisakti, yang menjadi inspirasi Nawacita pemerintahan Jokowi-JK.

Demi kedaulatan Indonesia, Soedirman bersama seluruh kekuatan rakyat harus bergerilya. Bagi Sudirman, tidak boleh sejengkal tanah pun di Republik ini dikuasai kolonial asing atau siapa pun, pertaruhannya adalah nyawa.

Bangsa ini juga mengenang Deklarasi Djuanda 1957. Bahwa laut merupakan bagian integral dari kepulauan Indonesia. Deklarasi Djuanda tersebut merupakan titik pangkal tegaknya negara kepulauan yang diakui dalam *United Nations Convention on Law of the Sea* (UNCLOS).

Dari Soekarno, Sudirman, dan Djuanda, yang ketiganya adalah anggota dan pimpinan Muhammadiyah, bangsa Indonesia saat ini harus belajar berkomitmen sekaligus memiliki tanggungjawab tinggi bagaimana mempertahankan kedaulatan Indonesia. Jika ada sejengkal tanah air, pulau, dan kekayaan berharga di bumi Indonesia ini dilepas atau dikuasai pihak lain, maka itu bentuk hilangnya kedaulatan.

Pemerintah dan seluruh institusi negara lainnya, kekuatan-kekuatan politik, dan seluruh komponen bangsa berkewajiban untuk mewujudkan kedaulatan Indonesia. Di negeri ini semestinya tidak boleh ada kebijakan yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara. Selain itu, negara tidak memberi ruang bagi kekuatan asing maupun domestik yang menguasai kekayaan dan perikehidupan nasional. Negara juga harus berdaulat secara hukum, agar tidak seorang pun di Republik ini berbuat sekehendaknya tanpa supremasi hukum yang benar dan adil.

Karenanya, kami percaya dan memberi apresiasi tinggi atas kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK dalam Nawacita poin satu yang bertekad "Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas-aktif, keamanan nasional yang terpercaya, dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim." Jangan biarkan di negeri ini ada tangan-tangan perkasa mendikte, menyandera, dan menguasai Indonesia yang menyebabkan hilangnya kedaulatan bangsa dan negara!

### ***Bapak Presiden dan para tamu undangan yang kami hormati.***

Selain kedaulatan, masalah yang sama pentingnya ialah soal keadilan sosial. Sila kelima Pancasila ini, menurut Prof Syafii Maarif, nasibnya paling terlantar. Presiden

Jokowi di banyak kesempatan dengan tegas menyatakan bahwa masalah utama bangsa Indonesia ialah kesenjangan sosial-ekonomi. World Bank tahun 2014 merilis data bahwa satu persen penduduk menguasai 55,5 persen kekayaan Indonesia.

Dalam perspektif para pendiri bangsa, konsep keadilan sosial dirumuskan dengan pertimbangan bahwa negara harus melindungi dan membela masyarakat terbesar yang tidak beruntung nasibnya. Negara harus hadir menegakkan keadilan sosial melalui kebijakan-kebijakan imperatif prorakyat, sehingga mereka menjadi tuan di negerinya sendiri. Sebaliknya, negara jangan membiarkan apalagi memanjakan siapa pun yang nyata-nyata merusak tatanan negara dan menyengsarakan rakyat.

Muhammadiyah sungguh menyambut baik dan mendukung *political will* Presiden Joko Widodo dengan menetapkan kebijakan *New Economic Policy* untuk tegaknya Ekonomi Berkeadilan Sosial. Kebijakan strategis tersebut jika diwujudkan secara nyata akan menjadi paradigma dan terobosan baru di era pemerintahan saat ini, yang tentu akan dikenang rakyat sebagai kado istimewa Indonesia.

Kita percaya pemerintah dapat menjalankan kebijakan-kebijakan prokeadilan dan prokeadilan sosial secara konsisten. Banyak komponen bangsa akan mendukung Muhammadiyah dengan etos "sedikit bicara banyak bekerja" akan menjadi mitra terdepan yang akan berkiprah secara proaktif. Kami menunggu kebijakan-kebijakan imperatif pemerintah yang benar-benar prorakyat, prokeadilan, dan prokeadilan sosial sebagaimana cita-cita luhur kemerdekaan.

Jika Indonesia mampu mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi secara signifikan, maka akan menjadi modal terbesar untuk maju, sekaligus mencegah potensi kerawanan nasional. Dalam situasi yang senjang secara ekonomi plus persoalan politik dan sosial-budaya yang sarat *antagonistik*, akan lahir masalah kecemburuan, sentimen, dan kerenggangan sosial yang dapat berubah menjadi benih ketegangan, konflik, kekerasan, dan anarkisme sosial.

Kita sungguh menghendaki Indonesia saat ini dan ke depan selain sukses dalam capaian demokrasi dan pertumbuhan ekonomi, sekaligus terwujudnya kedaulatan dan keadilan sosial. Indonesia haruslah menjadi milik semua, jangan menjadi milik segelintir orang atau kelompok tertentu. Bung Karno berpesan, "Kita hendak mendirikan suatu negara semua buat semua. Bukan buat satu orang,

bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua."

### **Bapak Presiden dan khusus Para Peserta Tanwir yang berbahagia**

Muhammadiyah memandang agenda menegakkan kedaulatan dan keadilan sosial tidak akan terlaksana manakala tidak lahir dari kekuatan i'tikad disertai kebijakan-kebijakan *imperatif* yang berani.

Khusus bagi peserta Tanwir Muhammadiyah, kita patut mengenang jasa Djuanda Sang Pelopor Kedaulatan Maritim, yang juga tokoh Muhammadiyah, yang sepenuh hayatnya mengabdikan diri untuk memajukan kehidupan bangsa. Putra Pasundan lulusan ITB yang pernah menjadi Perdana Menteri, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Perhubungan di era Soekarno ini usai purna tugas lebih memilih berkhidmat memimpin SMA Muhammadiyah Jakarta dengan gaji kecil ketimbang menerima tawaran almamaternya demi mendidik kecerdasan anak-anak bangsa.

Ketika Muhammadiyah bermuktamar Setengah Abad tahun 1962 di Jakarta, Djuanda menyampaikan testimoni sebagai berikut:

"Karena mengindahkan petunjuk orang tua saya, saya kenali Muhammadiyah. Bukan sekadar kenal saja, tetapi saya malah dipercaya memasak kecerdasan putera-puteri anak didik Muhammadiyah di masa itu. Penderitaan hidup dan pahit getir, bagi Muhammadiyah bukan soal, adanya hanya kepuasan hati karena kerjasama di antara kita dan pimpinan Muhammadiyah tetap terjalin dengan ukhuwah islamiyah yang seerat-eratnya." Dia menegaskan, "Setelah zaman Indonesia merdeka, gerak Muhammadiyah bertambah luas bidang tugasnya, dan bertambah-tambah pula lapangan pembangunan yang menjadi objeknya."

Semoga para peserta Tanwir dan seluruh anggota Muhammadiyah di seluruh persada tanah air dapat mencontoh perjuangan Djuanda dan para tokoh bangsa lainnya yang dengan jiwa Muhammadiyah berkemajuan mau berkhidmat sepenuh hati untuk kejayaan Indonesia. Selamat bertanwir, semoga Allah melimpahkan berkah dan anugerah-Nya bagi kita. Kepada Bapak Presiden dan Ibu Negara dan seluruh tamu undangan sekali lagi kami ucapkan terimakasih. *Jazakumullah khaira jaza. Nashrun min Allah wa Fathun Qarib.*